

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 7, Agustus 2023, Halaman 191-214
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8205683>

Analisis Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Super Prioritas Berkelanjutan di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur

Jelianti Yunita Salukh^{1*}, David B.W. Pandie², Apriana H.J. Fanggidae³

^{1,2,3}Ilmu Administrasi Universitas Nusa Cendana

*Email korespondensi: jeliantilulu@gmail.com

Abstrak

This study aims to describe the evaluation of central and local government policies through 5 key tourism factors namely Amenities, Attractions, Accessibility, Awareness (Tourism concern) and Accommodation, based on CBT for sustainable super priority tourism development. This study uses a qualitative descriptive method, using primary and secondary data and interviews with 11 informants related to the Analytical Hierarchy Process analysis tool. The research results show that the development of priority levels of tourism policies that need to be carried out by the government consists of accessibility, availability of transportation as access, supported by natural attractions, amenities where banking facilities are available, namely Bank, Money Changer, ATM, then Awareness to create MSME empowerment, and finally Accommodation Availability of decent, safe, comfortable and clean places to stay. These five things are the top priority in the formation of the Labuhan Bajo Super Priority tourism policy.

Keywords: Policy Evaluation, Tourism Development, Super priority.

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pemerintah terus melakukan berbagai kebijakan baik dibidang sosial dan ekonomi. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tentunya harus didukung oleh masyarakat agar kebijakan yang telah didesain atau dibuat dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan berbagai kebijakan tersebut pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan masyarakat dan akademisi untuk dapat memberdayakan semua potensi yang dimiliki untuk mendorong kemandirian ekonomi di setiap daerah.

Kemandirian ekonomi di setiap daerah telah didukung oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan antara lain penggerakan sektor ekonomi strategis yang telah digagas oleh Presiden Jokowi melalui program *nawacita* 2014-2019. Sektor strategis yang dimaksud merupakan sumber-sumber ekonomi yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian daerah, dimana terdapat tiga sektor unggulan pembangunan yakni pertanian, pariwisata dan perikanan. Diantara 3 sektor tersebut pariwisata merupakan *leading sector* pembangunan nasional.

Penetapan pariwisata sebagai *leading sector* dikarenakan sektor pariwisata dapat memberikan efek pengganda terhadap sektor lainnya (*Multiplier Effect*) sehingga memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian. Potensi alam, kearifan lokal, dan potensi budaya yang berbeda-beda antara daerah merupakan keunggulan pada sektor pariwisata. Pengembangan destinasi prioritas (super prioritas) merupakan bentuk perwujudan rencana pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010-2025 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2011. Pariwisata super prioritas merupakan pariwisata dengan pelayanan kualitas tinggi (*luxury*) dan kental dengan keunikan alam, sosial, budaya, dan masyarakat. Pelayanan dalam beberapa faktor yakni amenities, atraksi, aksesibilitas, dan kepedulian pariwisata sehingga wisatawan mendapat pengalaman bernilai tinggi dengan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup (kemenparekraf.go.id).

Peraturan Pemerintah inilah yang menjadi dasar dalam pembangunan pariwisata guna meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi dan mewujudkan industri pariwisata yang mampu

menjadi penggerak ekonomi nasional. Untuk mencapai cita-cita dalam pengembangan sektor pariwisata tersebut maka pemerintah menetapkan 5 lokasi wisata yang kemudian dikenal dengan nama 5 DPSP (Destinasi Pariwisata Super prioritas) yakni Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Danau Toba dan Likupang. Penetapan 5 lokasi wisata prioritas atau destinasi wisata premium ini merupakan program pemerintah untuk meningkatkan dan mengembangkan pemerataan pariwisata di Indonesia juga untuk menciptakan lapangan kerja di bidang pariwisata¹. Pengembangan pariwisata diluar Bali ini menjadi sangat penting karena diharapkan mampu menciptakan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

Secara khusus Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki daya tarik dan potensi wisata alam dan budaya yang luar biasa, dengan keindahan alam yang mempesona dan keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang khas menjadikan Provinsi NTT sebagai salah satu destinasi wisata cukup populer saat ini bagi kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Kabupaten Manggarai Barat dengan ibukota Labuan Bajo adalah salah satu dari sekian banyak wilayah di Provinsi NTT yang memiliki memiliki beragam potensi wisata alam dan kebudayaaa yang mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara, selain itu keberadaan wilayah Taman Nasional Komodo (TNK) sebagai salah satu dari “7 keajaiban dunia (*New 7 wonders*) menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.

Pemerintah terus berupaya untuk melakukan pengembangan terhadap 5 DPSP termasuk Labuan Bajo untuk menjadi daerah wisata yang berkualitas premium. Penetapan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas diawali dengan penetapan Labuan Bajo sebagai “10 Bali Baru” pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Labuan Bajo ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas, selanjutnya pada tahun 2017 Pulau Flores ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Premium, dan pada tahun 2018 sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No 32/2018 Pemerintah membentuk lembaga khusus yakni Badan Pelaksana Otoritas Labuan Bajo Flores (BPOLBF) merupakan satuan kerja dibawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat mandat untuk mengawal proses pengembangan wisata super prioritas di Labuan Bajo. Selanjutnya pada tahun 2019 Labuan Bajo diarahkan sebagai Destinasi Wisata Premium dan tahun 2020 status tersebut ditingkatkan menjadi “Destinasi Wisata Super Prioritas”. Pembangunan destinasi super prioritas Labuan Bajo meliputi pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik berfokus pada pembangunan amenities (*amenity*), aksesibilitas (*accessibility*), dan daya tarik wisata (*attractions*). Sementara itu pembangunan non-fisik termasuk pembangunan kompetensi sumber daya manusia (*people*), pengembangan *travel pattern* untuk upaya promosi hingga ekonomi kreatif di destinasi serta kepedulian pariwisata oleh masyarakat daerah wisata sehingga tercipta pertumbuhan yang berkelanjutan.

Potensi pariwisata Labuan Bajo menjadikannya salah satu objek wisata yang terus mengalami peningkatan wisatawan, berikut perkembangan wisatawan di Labuan Bajo selama enam tahun terakhir :

Tabel 1. Jumlah Wisatawan Labuan Bajo Tahun 2017-2022

Tahun	Wisman (Jiwa)	Wisnus (Jiwa)	Total (Jiwa)
2017	76,612	48,457	125,069
2018	12,111	55,423	67,534
2019	144,068	77,635	221,703
2020	13,089	38,529	51,618

¹Marry Ismowati dkk, Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Memaksimalkan Potensi ekonomi dan Pariwisata Kawasan Super Prioritas Nasional (KPSN) Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, Vol.9,No1, Maret 2022,pp 41-49,

2021	3,443	88,099	91,542
2022	42,916	216,658	259,574

Sumber : BPS.go.id

Berdasarkan pada Tabel 1.1 terjadi perkembangan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, walaupun pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah wisatawan sebesar 76.71% akibat pandemi covid 19 namun pada tahun 2022 jumlah wisatawan mengalami peningkatan kembali 64.73%. Peningkatan jumlah wisatawan ini menurut BPOLBF sebagai pengelola pariwisata Labuan Bajo tidak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Manggarai Barat berupa peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang mendukung pengembangan pariwisata Labuan Bajo menjadi pariwisata Super Prioritas yang berkelanjutan.

Menurut BPOLBF faktor kunci pengembangan pariwisata super prioritas yang berkelanjutan yakni atraksi, amenitas, aksesibilitas, kepedulian pariwisata (*awerness*) dan promosi terhadap akomodasi yang tersedia pada wisata premium Labuan Bajo, sehingga pemerintah melalui BPOLBF mengembangkan berbagai kebijakan pengembangan melalui kelima faktor tersebut. Kebijakan yang dilakukan yang berkaitan dengan atraksi yakni pengembangan *health tourism*, *yatch tourism* dan *adventure tourism*. Kebijakan amenitas yakni penyediaan jaringan 4G/5G untuk menunjang pariwisata yang berbasis digital. Kebijakan aksesibilitas yakni percepatan realisasi infrastruktur penunjang pariwisata, SDM yakni pemberdayaan UMKM dan promosi yakni promosi akomodasi wisata sambil investasi sebagai bagian *high-end tourism*. Pengembangan pariwisata super prioritas dengan menggunakan 5 faktor kunci tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan wisatawan sehingga dapat mencapai kemandirian ekonomi bagi daerah destinasi, namun hal ini dapat tercapai dengan baik jika terjadi sinergitas antara unsur pengelola dengan masyarakat.

Sinergitas antara unsur masyarakat tersebut akan menciptakan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Pembangunan seringkali tidak mencapai sasaran dikarenakan tidak adanya keterlibatan masyarakat, oleh karena itu dalam administrasi pembangunan ada beberapa keharusan diantaranya; melibatkan masyarakat, mampu menjelaskan maksud dan tujuannya kepada masyarakat dan penjelasan tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, dalam implementasinya dan prosesnya harus mengikutsertakan rakyat dan dilaksanakan harus sesuai dengan maksudnya, secara jujur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Larasati,2022). Oleh karena itu, pengembangan pariwisata super prioritas berkelanjutan di Labuan Bajo perlu melibatkan masyarakat lokal melalui komunitas yang ada di Pulau Flores khususnya di Kabupaten Manggarai Barat didasarkan pada *Community Based Tourism*(CBT).

Pelaksanaan pariwisata berdasarkan CBT, mengutamakan komunitas masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisatanya. Komunitas lokal merupakan pemangku kepentingan yang secara moral legal dalam pembangunan pariwisata. Ada 3 unsur pokok yang menentukan tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. Pertama, adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, kedua, adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, ketiga, adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Jenis partisipasi yang harus diperhatikan dalam masyarakat adalah: (1) partisipasi dalam perencanaan; (2) partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan atraksi, amenitas, aksesibilitas, *awerness* dan akomodasi; (3) partisipasi dalam pemanfaatan hasil; dan (4) partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi ini secara bersama-sama menjadi siklus bagaimana kegiatan pembangunan pariwisata di daerah berjalan. Meskipun dalam kenyataannya jarang terjadi siklus yang berinteraksi secara konsisten, lengkap dan maksimal, namun partisipasi-partisipasi ini perlu terus didorong agar masyarakat semakin merasa memiliki dan bertanggungjawab. Namun, apakah pengembangan pariwisata super prioritas Labuan Bajo yang telah dilakukan dengan menggunakan atraksi, amenitas, aksesibilitas, sumber daya manusia (*people*) dan kepedulian kepariwisataan sebagai dasar pengembangan pariwisata telah menerapkan dan menjalankan CBT dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung pengembangan pariwisata sehingga tujuan kemandirian ekonomi dapat tercapai di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Kabupaten Manggarai sebagai pemilik asset pariwisata?

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Evaluasi Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Daerah melalui 5 kunci faktor utama pariwisata yakni Amenitas, Atraksi, Aksesibilitas, *Awearness* (Kepedulian kepariwisataan) dan Akomodasi berdasarkan CBT untuk pengembangan pariwisata super prioritas berkelanjutan? dengan tujuan penelitian Tujuan penelitian adalah Mendeskripsikan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Daerah melalui 5 kunci faktor utama pariwisata yakni Amenitas, Atraksi, Aksesibilitas, *Awearness* (kepedulian kepariwisataan) dan Akomodasi, berdasarkan CBT untuk pengembangan pariwisata super prioritas berkelanjutan.

METODE

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara menurut Moleong (2007) penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Menurut Arikunto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat dilaksanakan penelitian.

Penelitian deskriptif tidak memerlukan administrasi dan pengontrolan terhadap perlakuan serta tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa tertentu tetapi menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Sementara Nazir berpendapat bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu situasi, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penulisan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Adapun mengenai pendekatan kualitatif, Maleong mengartikan sebagai penelitian yang bertujuan memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada obyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara mendiskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan metode ilmiah.

Metode analisis kualitatif dilakukan karena permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang tidak terungkap melalui data-data statistik, sehingga perlu pendekatan tertentu untuk memahaminya. Tipe penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan suatu fenomena atau kenyataan sosial, yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya kebijakan Sektor Pariwisata yang ada di Labuhan Bajo. Fokus dalam penelitian ini adalah evaluasi kebijakan pengembangan industri pariwisata dengan menggunakan 5A sebagai indikator faktor keberhasilan dari Kerangka Strategi Penguatan Pariwisata Labuan Bajo yaitu: 1) Atraksi, 2) Amenitas, 3) Aksesibilitas, 4) *Awearness*, dan 5) Akomodasi kelima indikator ini dilihat dari sisi CBT.

Alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk lebih memudahkan pencarian data di lapangan bila berhadapan dengan kenyataan jamak. Dengan penelitian kualitatif maka dalam kerangka analisis tidak menggunakan cara atau prosedur statistik atau bentuk hitungan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian kualitatif mengemukakan bahwa: “Desain penelitian deskriptif kualitatif merupakan desain penelitian yang tidak terstruktur seperti desain penelitian kuantitatif, karena bila terstruktur berarti kaku, tidak fleksibel sehingga data-data yang berharga sekalipun akan diperlakukan sebagai tamu tak diundang”. Kekuatan paradigma kualitatif justru terletak pada *inductive* dan *grounded*, yang memang tidak sejalan dengan pendekatan atau desain terstruktur. Peneliti kualitatif berfokus pada fenomena tertentu yang tidak memiliki *generalizability* dan *comparability*, tetapi memiliki *internal validity* dan *contextual understanding*.

Penelitian ini dilakukan di Labuhan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, merupakan destinasi wisata super prioritas yang ditetapkan pemerintah. Hal inilah yang menjadi alasan utama penentuan tempat penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Gambaran Umum Kondisi Wilayah dan Pariwisata di Labuan Bajo
Kondisi Wilayah**

Kota Labuan Bajo merupakan ibu kota Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di wilayah bagian barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Manggarai Barat memiliki luas daratan mencapai 9.450 km² yang berada di daratan Flores, serta memiliki beberapa pulau besar seperti pulau Komodo, Rinca, Longos dan beberapa pulau kecil lainnya.

Kabupaten Manggarai Barat terletak di antara 080 14' – 090 00' Lintang Selatan (LS) dan 1190 21 – 1200 20' Bujur Timur (BT) dengan batas wilayah bagian utara berbatasan dengan Laut Flores, bagian selatan dengan Laut Sawu, bagian barat dengan Selat Sape, dan bagian timur dengan Kabupaten Manggarai.

Kabupaten Manggarai Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Manggarai berdasarkan Undang Undang No. 8 Tahun 2003, memiliki 10 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 121. Berikut pembagian wilayah administratif Kabupaten Manggarai Barat :

Tabel 2
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Manggarai Barat

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1	Komodo	16
2	Sano Nggoang	11
3	Mbeliling	13
4	Lembor	11
5	Lembor Selatan	10
6	Welak	11
7	Kuwus	17
8	Ndoso	10
9	Boleng	9
10	Macang Pacar	13

Sumber : BPS Kabupaten Manggarai Barat

Kota Labuan Bajo sendiri terletak di Kecamatan Komodo, berbatasan langsung dengan area daratan dan perairan yaitu Laut Flores di bagian utara dan Selat Sape di bagian barat, serta di bagian selatan dan timurnya masing-masing berbatasan dengan Desa Macang Tanggar dan Desa Watu Nggalek serta Desa Pota Wangka.

Dilihat dari keadaan topografi, Labuan Bajo berada pada ketinggian 0-500 m dari permukaan laut, wilayah kawasan kota Labuan Bajo terletak pada wilayah yang bergelombang sehingga berada di ketinggian yang berbeda. Ketinggian kawasan kota Labuan Bajo yang diukur dari permukaan laut menunjukkan ketinggian 100 mdpl, 100-500 mdpl, 500-1000 mdpl, dan di atas 1000 mdpl. Secara dominan Labuan Bajo banyak memiliki dataran sekitar 100-500 mdpl. Labuan Bajo merupakan wilayah yang bergelombang dengan morfologi wilayahnya terdiri dari dataran tinggi (pegunungan), pantai dan dataran landai, dengan kemiringan lahan yang bervariasi antara 0% - 40%. Kota Labuan Bajo terdiri dari 6 desa atau kelurahan, berikut nama kelurahan dan luas wilayahnya :

Tabel 3
Nama Kelurahan dan Luas Wilayah

Kelurahan/Desa	Luas (Ha)
Batu Cermin	764
Golobilas	2.116
Gorontalo	743
Nggorang	2.107
Labuan Bajo	1.388
Wae Kelambu	1.728
Total	8.846

Sumber: Kecamatan Komodo Dalam Angka, 2021

Total luas wilayah Kota Labuan Bajo yakni sebesar 8.846 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 31.637 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Jumlah Penduduk Tahun 2021

Kelurahan/Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
Batu Cermin	2.487	2.722	5.209
Golo Bilas	2.257	2.132	4.389
Gorontalo	3.522	3.461	6.983
Nggorang	1.001	899	1.900
Labuan Bajo	3.503	3.345	6.848
Wae Kelambu	3.153	3.155	6.308
Total	15.923	15.717	31.637

Sumber: Kecamatan Komodo Dalam Angka, 2021

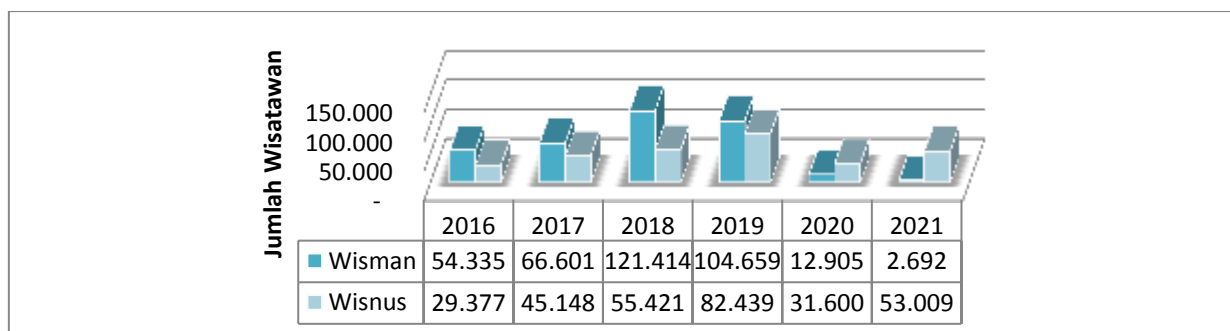
Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui jumlah penduduk di Kota Labuan Bajo di dominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebesar 50,33 % dari total jumlah penduduk Kota Labuan Bajo dan jumlah penduduk tertinggi terdapat pada kelurahan Gorontalo sebesar 22, 07% dari total jumlah penduduk.

Kondisi Pariwisata

Pembangunan nasional dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pengembangan pariwisata harus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan memanfaatkan sumber serta potensi pariwisata nasional sehingga menjadi kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, khususnya masyarakat sekitarnya untuk merangsang pembangunan regional serta memperkenalkan identitas dan kebudayaan bangsa. Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di ujung barat Pulau Flores merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sekarang lebih dikenal sebagai Destinasi Wisata Super Prioritas Labuan Bajo. Objek wisata yang ada di Manggarai Barat antara lain Taman Nasional Komodo, Pulau Kalong, Gua Batu Cermin, Air Terjun Cunca Wulang dan Cunca Rami, Danau Sano Nggoang, Gua Rangko, Pantai pink dan lain sebagainya. Dengan memiliki potensi pariwisata yang besar, kegiatan kepariwisataan di Manggarai Barat khususnya di Labuan Bajo diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan pembangunanyang dapat diandalkan, sehingga dapat menciptakan kemandirian ekonomi di daerah Nusa Tenggara Timur.

Labuan Bajo sebagai pariwisata super prioritas terus mendapatkan perhatian dari wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara yang terus meningkat setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang digambarkan pada grafik 4.1 di bawah ini.

Grafik 1
Jumlah Wisatawan



Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, diolah peneliti 2023

Berdasarkan pada grafik 1 selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan didominasi oleh wisatawan mancanegara sebesar 54,97% sedangkan wisatawan nusantara sebesar 45,02% dari total wisatawan yang datang berwisata ke Labuan Bajo. Pada 6 tahun terakhir jumlah wisatawan mengalami fluktuasi, dari grafik 4.1 dapat dilihat perkembangan jumlah wisatawan yang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan jumlah wisatawan pada tahun 2017 sebesar 33,49% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2018 meningkat sebesar 99,48%. Pada tahun 2019 walaupun secara jumlah wisatawan keseluruhan wisatawan naik sebesar 5,80% namun laju pertumbuhannya lebih kecil dari pada tahun 2018, hal ini dikarenakan jumlah wisatawan mancanegara mengalami penurunan sebesar 13,79%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah wisatawan ke Labuan Bajo sebesar 76,62%, hal ini disebabkan terjadinya pandemi covid-19 dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan hampir di seluruh negara termasuk di Indonesia. Namun pada tahun 2021 kondisi pariwisata Labuan Bajo kembali mengalami kenaikan jumlah wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara sebesar 25,15% namun peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah wisatawan nusantara sebesar 95,16 % dari total wisatawan yang berkunjung pada tahun 2021.

Jumlah wisatawan yang terus meningkat mengharuskan pemerintah pusat dan daerah bersinergi untuk membangun pariwisata Labuan Bajo. Salah satu faktor yang paling penting adalah akomodasi, amenitas, aksesibilitas dan atraksi yang mendukung kelancaran berwisata dari wisatawan. Berikut gambaran umum mengenai akomodasi, amenitas, aksesibilitas dan atraksi yang ada di Super Prioritas Labuan Bajo

1) Akomodasi

Fasilitas penginapan merupakan salah satu fasilitas yang penting untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Fasilitas penginapan ini biasanya digunakan untuk tempat beristirahat wisatawan baik sebelum dan sesudah melakukan kegiatan wisata. Dengan tersedianya fasilitas penginapan/hotel dapat mendorong wisatawan untuk datang berkunjung atau melakukan perjalanan wisata menuju daerah tujuan wisata. Di kota Labuan Bajo sudah tersedia fasilitas penginapan/hotel dengan berbagai jenis kelas baik hotel berbintang maupun non bintang yang terus bertambah setiap tahunnya. Pada Tahun 2021 di Kabupaten Manggarai Barat khususnya Labuan Bajo terdapat 91 Usaha Akomodasi/Hotel, turun 27,03% dari tahun 2020. Dari 81 usaha akomodasi tersedia 1.966 kamar dan 4.047 tempat tidur dimana persentase kamar di Hotel Bintang sebesar 50,45%. Jumlah tamu yang menginap pada 81 hotel tersebut terdiri dari 5.686 orang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 133.426 orang selama tahun 2021

2) Atraksi

Labuan Bajo menjadi tujuan wisata yang kondisinya mendukung untuk dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata. Aktivitas-aktivitas wisata yang telah ada di Labuan Bajo menjadi modal atau sumber kepariwisataan. Modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan itu ada tiga, yaitu 1) *Natural Resources* (alami), 2) Atraksi wisata budaya, dan 3) Atraksi buatan manusia itu sendiri. Atraksi wisata yang terdapat di Labuan Bajo menjadi modal kepariwisataan dapat menahan wisatawan selama sehari-hari dan dapat berkali-kali dinikmati, atau bahkan pada kesempatan lain wisatawan bisa berkunjung ketempat yang sama. Atraksi yang ada di Labuan Bajo antara lain :

- a. *carrying capacity TN Komodo*
- b. *KSPN Labuan Bajo, Puncak Waringin, Pedestrian Premium, waterfront city*
- c. *KSPN Ende: Bumi Pancasila dan Geopark Kelimutu*

Selain itu terdapat atraksi yang diberikan dan berdasarkan pada kehidupan dan kearifan lokal masyarakat Pulau Flores dan khususnya Labuan Bajo antara lain:

- a. Desa Golo Bilas berupa kegiatan hidropnik
- b. Kelurahan Wae Kelambu (*Waste Management*)
- c. Desa Batu Cermin (atraksi *natural resource* berupa Goa Batu cermin dan bersepeda santai di sore hari)
- d. Desa Komodo atraksi *Naturalist Guide dan Wisata Konservasi Komodo*
- e. Desa Pasir Panjang atraksi *Naturalist Guide dan Wisata Konservasi Komodo*)
- f. Desa Koja Doi atraksi wisata kuliner dan bahari
- g. Desa Bajo Pulo atraksi wisata kuliner dan bahari

3) Amenitas

Amenity atau amenitas adalah segala macam sarana dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti : rumah makan, transportasi dan agen perjalanan. Fasilitas restoran dan rumah makan di Labuan Bajo juga sudah tersedia dalam jumlah yang cukup memadai. Fasilitas rumah makan ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan wisatawan akan makanan. Fasilitas rumah makan ini banyak tersebar pada Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Pantai Pede. Para wisatawan dapat memilih 68 restoran dan rumah makan yang ada di Labuan Bajo yang menyajikan beraneka ragam menu masakan

4) Aksesibilitas

Accessibility merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan pariwisata. Segala macam transportasi ataupun jasa transportasi menjadi akses penting dalam pariwisata. Di sisi lain akses ini diidentikkan dengan transferabilitas, yaitu kemudahan untuk bergerak dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Aksesibilitas yang terdapat di Labuan Bajo adalah sebagai berikut:

- a. Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo
- b. Jalan Lintas Utara Flores
- c. Travel dan bus pariwisata dan kendaraan hotel
- d. Sarana transportasi laut berupa fasilitas pelabuhan orang dan pelabuhan barang. Selain pelabuhan kapal besar telah tersedia juga pelabuhan penyebrangan untuk menuju daerah sekitar Labuan Bajo seperti pulau komodo dan pulau lainnya untuk kepentingan pariwisata.

5) Awareness

Kesadaran warga lokal akan peningkatan status wilayah Labuan Bajo menjadi DPSP perlahan mulai tumbuh, walau memang belum seluruh warga dapat memahami kondisi ini, hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yakni :

- a. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo, maka warga lokal yang memiliki unit usaha UMKM, diantaranya usaha tenun ikat, pengrajin cinderamata/handycraft, homestay, warung/rumah makan, penyewaan kendaraan dll merasakan peningkatan permintaan barang/jasa. Hal ini dapat meningkat tajam jika ada kegiatan atau even nasional maupun internasional.
- b. Adanya peran pemerintah yang semakin gencar dalam memberikan pelatihan-pelatihan bagi UMKM lokal dimana diharapkan agar produk yang dihasilkan mampu bernilai jual dan berkualitas tinggi. Beberapa upaya yang dilakukan yakni melalui *business matching* umkm dari hulu ke hilir, mempertemukan supplier dan buyer. Beberapa asosiasi wisata giat melatih karyawan/pegawai agar memiliki sertifikasi pelayanan (sertifikasi profesi) wisata berstandar internasional.
- c. Meningkatnya permintaan terhadap atraksi budaya yakni tarian daerah yang dipertontonkan pada saat event, baik itu di lokasi wisata ataupun penyambutan tamu-tamu pada saat event kenegaraan.
- d. Konsep CBT terjadi pada masyarakat secara proporsional sesuai dengan peran dan aktivitas ekonomi yang dilakukan. Masyarakat tidak merasa “terpinggirkan” akan status ini, karena pemerintah banyak melakukan pendampingan dan memberikan program-program pelatihan bagi UMKM agar turut berpartisipasi dalam “ruang” pariwisata.
- e. Beberapa asosiasi industri wisata turut berperan serta dalam konteks CBT yakni dengan menghibau kepada pelaku usaha/bisnis wisata agar memberikan alokasi sebesar 85% bagi tenaga kerja lokal untuk berperan dalam industri wisata prioritas. Disamping itu juga melakukan proteksi terhadap keberadaan tenaga kerja lokal dengan memberikan pelatihan yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi.

6) Rantai Pasok/Supply Chain

- a. Berdasarkan hasil penelitian maupun diskusi dengan beberapa dinas terkait di Kabupaten Manggarai Barat diketahui bahwa terdapat beberapa bahan pangan yang dibutuhkan untuk industri wisata di Labuan Bajo saat ini masih disupply dari provinsi lain diantaranya Sulawesi Selatan, NTB dan Jawa Timur. Beberapa bahan pangan diantaranya ada beras, sayur-sayuran, buah-buahan, daging olahan, tepung, daging ayam, bahan baku pembuat kompiang (roti khas manggarai) hal ini disebabkan karena Kabupaten Manggarai Barat secara umum belum dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, khususnya dalam memenuhi standart kuantitas dan kualitas permintaan bahan pangan hotel/restaurant dengan

kelas luxury. Selain itu masalah harga bahan baku yang didatangkan dari provinsi lain dijual dengan harga yang lebih murah, sehingga pedagang cenderung untuk membeli dari luar wilayah NTT.

- b. Kondisi ini tentu membutuhkan peran serta pemerintah daerah dalam membuat kebijakan mengenai upaya pemenuhan kekurangan bahan pangan untuk industri wisata di Labuan Bajo, salah satunya dengan melakukan pemetaan/zonasi pertanian baik di wilayah Manggarai Barat sendiri maupun di kabupaten lain di Provinsi NTT yang memiliki produk unggulan masing-masing, sehingga masalah kekurangan supply bahan pangan dapat berangsur-angsur dapat dipenuhi secara mandiri. Tentunya dengan tetap memperhatikan standart jumlah dan mutu produk yang akan disupply.
 - c. Untuk memitigasi maraknya produk dari luar wilayah NTT yang masuk ke pasar Labuan Bajo, pemerintah perlu mengupayakan agar seluruh bahan pangan/bahan baku yang dibutuhkan dapat dipenuhi dari dalam wilayah NTT, hal ini tentu agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal dan meningkatkan kondisi perekonomian provinsi NTT itu sendiri. Hanya untuk produk yang memang tidak dapat disupply secara mandiri oleh kabupaten di provinsi NTT maka kebijakan mengenai perdagangan antar provinsi dapat dibuka.
- 7) Kondisi Keamanan
- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat memberikan perhatian yang besar terhadap isu keamanan, mengingat kondisi keamanan menjadi faktor kunci dalam industri pariwisata.
 - b. Penetapan Labuan Bajo sebagai “10 Bali Baru” dapat menciptakan isu keamanan nasional dan internasional, oleh karena itu perlu diikuti dengan peningkatan keamanan dan pengetatan pemeriksaan kepada wisatawan disetiap pintu masuk ke Labuan Bajo.
 - c. Pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian perlu membangun koordinasi yang intens dengan pihak-pihak terkait, menyiapkan peralatan dan sarana prasarana yang cukup memadai dalam hal mencegah ataupun mengatasi masalah keamanan.

Kebijakan Pariwisata Di Labuan Bajo Implementasi Pasca Arahan Presiden

Tujuh arahan Presiden tersebut kemudian secara cepat diimplementasikan oleh jajaran kementerian dan lembaga terkait bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) serta pemangku kepentingan lainnya. Berikut sejumlah tindak lanjut yang dilakukan oleh jajaran pemerintahan pasca arahan Presiden tersebut:

- a. Formulasi tujuh faktor kunci sukses pariwisata

Pemerintah memformulasikan tujuh faktor kunci sukses pariwisata berkualitas, meliputi lingkungan, SDM, aktivitas, manajemen perjalanan, infrastruktur, amenities dan kesehatan, serta keamanan dan keselamatan. Ketujuh kunci sukses yang sejalan dengan tujuh arahan Presiden ini menjadi salah satu pijakan perumusan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Labuan Bajo Flores. Rencana induk tersebut diimplementasikan oleh kementerian/lembaga/pemda sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan didukung oleh pemangku kepentingan lainnya.

- b. Peningkatan infrastruktur pendukung konektivitas.

Untuk jalur udara, dilakukan perluasan Bandara Komodo hingga saat ini memiliki landasan pacu (runway) sepanjang 2.600 meter. Landasan ini masih akan diperpanjang 100 meter sehingga dapat didarati pesawat berbadan lebar atau wide body. Tak hanya perluasan, pemerintah juga melakukan beautifikasi atau pengindahan area Bandara Komodo dengan mengusung konsep tradisional dan sentuhan modern dengan motif songke mata manuk atau mata ayam. Untuk jalur darat, dilakukan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, trotoar, dan drainase. Peningkatan kualitas layanan jalan tersebut diiringi dengan penataan kawasan pedestrian sehingga memiliki trotoar kualitas premium. Kemudian untuk jalur laut, dilakukan pembangunan Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo. Selain itu dilakukan juga peningkatan rute baik di darat, laut, dan udara ke sekitar 35 daerah tujuan wisata di Flores, Alor, Lembata, dan Bima (Floratama). Peningkatan konektivitas ini diharapkan dapat meningkatkan arus wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri.

- c. Penataan kawasan

Penataan kawasan di Labuan Bajo difokuskan pada lima zona di Waterfront City yaitu Zona A Bukit Pramuka, Zona B Kampung Air, Zona C Dermaga, Zona D kawasan Pantai Marina, dan Zona E Kampung Ujung. Penataan kawasan ini juga dilengkapi dengan penataan kampung dengan mengembangkan hunian-hunian pariwisata atau homestay milik masyarakat Labuan Bajo agar masyarakat memperoleh manfaat nyata dari pengembangan pariwisata ini. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan kawasan Pulau Rinca. Penataan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pariwisata Taman Nasional Komodo di Pulau Rinca. Pulau Rinca ini akan diperuntukkan sebagai objek wisata untuk melihat komodo, sementara Pulau Komodo dan Pulau Padar akan difokuskan untuk konservasi.

d. **Penyiapan SDM dan UMKM**

Pemerintah telah menggelar berbagai pelatihan bagi para pelaku UMKM dan koperasi di Labuan Bajo, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Para pelaku UMKM dan koperasi antara lain dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan di bidang produksi, pemasaran, pembiayaan, dan manajemen usaha. Pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi digital dan mendorong UMKM untuk masuk ke platform digital agar lebih dapat mengembangkan usahanya.

Selain itu, dibangun juga Puncak Waringin sebagai creative hub bagi para pelaku UMKM yang mengusung kearifan lokal. Di Puncak Waringin ini terdapat pusat suvenir, rumah tenun, amfiteater, hingga ruang terbuka hijau. Selain itu, dikembangkan juga ekosistem industri dalam bentuk Floratama Creative Hub sebagai ekosistem pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

e. **Peningkatan ketersediaan air baku .**

Salah satu infrastruktur yang dibangun untuk mendukung pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Labuan Bajo adalah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Wae Mese II. Kehadiran SPAM berkapasitas 2 x 50 liter per detik ini akan mencukupi kebutuhan air bersih di Labuan Bajo. Di samping menyediakan air bersih, pemerintah juga membangun fasilitas sanitasi berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Labuan Bajo dengan kapasitas 250 meter kubik per hari.

f. **Pembangunan sistem pengelolaan sampah (SPS)**

Pemerintah membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Warloka yang dapat mengolah sampah dengan kapasitas 20 ton per hari. Selanjutnya, terdapat Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Warloka yang berfungsi untuk memproses akhir sampah yang telah diolah di TPST berupa residu abu dengan kapasitas dua ton per hari. Sistem pengelolaan sampah di Warloka ini membuat residu sampah hanya tinggal sepuluh persen berupa abu yang dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Selain itu juga dibangun komunitas dan koperasi berbasis masyarakat yang peduli terhadap permasalahan sampah di Labuan Bajo.

g. **Keamanan Wisatawan.**

Berbagai upaya yang dilakukan untuk menjamin keamanan para wisatawan, antara lain, menyediakan emergency hotline, adanya command center, serta melakukan simulasi yang melibatkan jajaran terkait mulai dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga Basarnas.

h. **Promosi Terintegrasi**

Upaya percepatan penataan kawasan dan infrastruktur juga dibarengi dengan upaya promosi terintegrasi Labuan Bajo sebagai sebuah destinasi pariwisata super prioritas. Berbagai event-event berskala lokal maupun internasional digelar di Labuan Bajo untuk dapat memikat wisatawan untuk berkunjung. Labuan Bajo juga telah memiliki calendar of event serta menawarkan paket-paket wisata yang merupakan bagian dari integrasi promosi wisata di wilayah tersebut. Pada tahun 2022, Promosi Bajo juga dibungkus dengan kampanye tematik, seperti #RinduLabuanBajo dan #ItsTimeForLabuanBajo. Pemerintah juga menjadikan Labuan Bajo sebagai salah satu tuan rumah penyelenggaraan rangkaian pertemuan G20 di bawah presidensi Indonesia tahun 2022. Labuan Bajo, antara lain, menjadi lokasi Pertemuan Ketiga Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau 3rd Meeting Digital Economy Working Group (DEWG) G20 serta Pertemuan Kedua Sherpa atau 2nd Sherpa Meeting. Kegiatan internasional lain yang diselenggarakan pemerintah di Labuan Bajo pada tahun 2022 di antaranya Asia International Water Week Ke-2, side event G20, serta Presidensi Asian Summit di tahun 2023.

Kebijakan Pariwisata Labuan Bajo

Kebijakan publik dalam rangka mendorong proses pembangunan tidak hanya diperlukan pada tingkat nasional, tetapi juga pada tingkat daerah. Perumusan kebijakan pembangunan daerah perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan berbagai aspek penting seperti visi dan misi pembangunan, kondisi dan potensi daerah, permasalahan pokok pembangunan dan proyek pembangunan ke depan.

Kebijakan pembangunan Provinsi NTT diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT No. 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, dimana salah satu misinya adalah membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*).

Selaras dengan itu, kelembagaan kepariwisataan mengalami transformasi merupakan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki Labuan Bajo dalam memikat para wisatawan. Transformasi ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 atau Ripparnas 2010-2025. Untuk mempercepat transformasi tersebut pemerintah pun membentuk Badan Otoritas Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOLBF) melalui Perpres Nomor 32 Tahun 2018. Badan ini dibentuk agar pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan pariwisata Labuan Bajo dan juga Flores lebih terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu. Juga Peraturan Menteri Pariwisata No. 7 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, yang mempunyai wewenang untuk melakukan Koordinatif meliputi Koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga menetapkan Labuan Bajo menjadi satu dari lima destinasi pariwisata super prioritas (DPSP).

Pertama, penataan kawasan. Penataan kawasan tersebut, antara lain, meliputi Bukit Pramuka, Kampung Air, pelabuhan peti kemas dan dermaga penumpang, Kawasan Marina, serta di zona Kampung Ujung. Daerah ini diproyeksikan menjadi ruang publik dengan lanskap yang indah yang menjadi penggerak pembangunan kawasan serta pusat aktivitas masyarakat di Labuan Bajo.

Kedua, peningkatan infrastruktur terutama perluasan Bandar Udara (Bandara) Komodo yang menjadi gerbang masuk para wisatawan ke Labuan Bajo. Perluasan bandara ini diharapkan berimbas pada peningkatan jumlah wisatawan.

Ketiga, penyiapan sumber daya manusia (SDM), partisipasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penguatan konten lokal. Keterlibatan masyarakat lokal sangat penting dalam pengembangan pariwisata di Labuan Bajo. Oleh karena itu, upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM lokal harus segera dilakukan, disesuaikan dengan kebutuhan industri pariwisata yang sedang dikembangkan. Selain itu, pelibatan UMKM setempat juga menjadi keharusan. Presiden mengharapkan adanya sebuah creative hub yang akan menggarap produk-produk lokal, baik dari sisi pengemasan, desain, harga, dan lain-lain. Dengan ini, produk Labuan Bajo seperti tenun, kopi, kerajinan, hingga makanan khas dapat tumbuh. Seiring dengan itu, atraksi budaya lokal atau kesenian daerah juga harus semakin hidup dan menghidupkan area yang ada di Labuan Bajo.

Keempat, penanganan sampah. Infrastruktur untuk pembuangan dan pengolahan sampah terpadu baik sampah darat maupun laut menjadi keharusan.

Kelima, ketersediaan air baku. Ketersediaan air ini sangat vital untuk mendukung pariwisata dan kehidupan masyarakat lokal di Labuan Bajo.

Keenam, keamanan wisatawan. Hal ini dilakukan antara lain dengan pelibatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Terakhir, promosi terintegrasi. Presiden meminta dilakukan promosi besar-besaran mengenai DPSP Labuan Bajo, termasuk gelaran event-event internasional yang diharapkan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung.

Berdasarkan PP 50/2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 201 dan Pemmpar 7/2018 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores dan Pepres 32/2018 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores. Merupakan dasar Pembentukan BPOLF, tugas BPOLF terdiri dari dua sebagai

Koordinatif dan Otoritatif untuk koordinatif terdiri dari Koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi terhadap perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores (10 Kecamatan), untuk otoritatif terdiri dari Perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan & pengendalian di zona otorita (400 ha di Hutan Nggorang Bowosie). Namun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala diantaranya

- 1) Kendala Tata Batas Lahan Otorita terganggu kelompok perambah hutan yang dibiarkan mengokupansi lahan negara. Di sisi utara, terdapat area milik masyarakat adat yang perlu direkonstruksi dikeluarkan dari hutan Penindakan terhadap kelompok perambah hutan tidak dapat membangun akses jalan masuk sejauh 6,2 KM dari Jalur Trans Flores.
- 2) Sudah ada investor yang melakukan MoU yaitu Dusit Internasional. Namun BPOLBF harus menjadi BLU untuk bisa menindaklanjuti investasi.
- 3) Adanya moratorium pembangunan hotel bintang 4-5 di Labuan Bajo pada bulan oktober 2022 oleh Pemerintah Daerah.
- 4) BPOLBF tidak diperbolehkan menggunakan anggaran membangun di luar kawasan otorita, sehingga tidak bisa membangun akses jalan masuk sejauh 6,2 KM dari Jalur Trans Flores

Kendala diatas sudah ditemukan solusinya diantaranya :

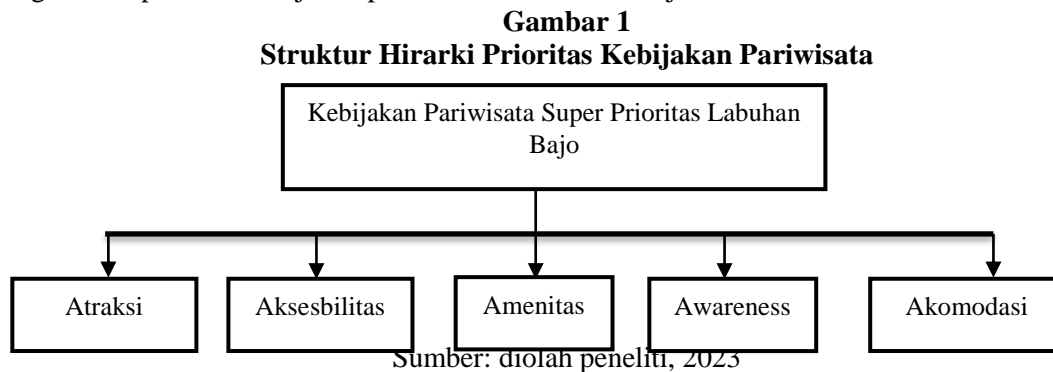
1. Penindakan terhadap kelompok perambah hutan. Rekonstruksi lahan adat masyarakat Lancang keluar dari status hutan, sesuai pal batas Belanda
2. Percepatan proses perubahan menjadi BLU. Target T1 2022
3. Percepatan ground breaking Hotel dengan penyiapan akses jalan masuk Lahan otorita sesuai ijin dispensasi pembangunan oleh KLHK.
4. Dukungan pembangunan akses jalan masuk oleh Kementrian PUPR atau diskresi ijin pembangunan akses jalan masuk ke kawasan. Diperlukan untuk target ground breaking sebelum Oktober 2022

Diselaraskan dengan beberapa kebijakan yang dilakukan, diselaraskan dengan target Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas, pengembangan kedepan perlu focus pada peningkatan factor pendukung, penguatan faktor dasar dan peningkatan sustainabilitas lingkungan, *unique experience*, dan *high value*. Peran dan dukungan pemerintah sebagai pemimpin daerah dan pemegang kebijakan pembangunan, memiliki nilai strategis melalui peraturan untuk mengatur pembangunan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi lokal. Penggunaan bahan baku lokal dan kebijakan produksi dan distribusi pangan lokal akan menggerakkan perekonomian daerah. Namun seharusnya memberikan kesempatan bagi unit usaha untuk membuat ekonomi produktif skala mikro menengah untuk berkembang melalui pokdarwis setempat. Untuk mendukung *five essentials As Of Tourism* atau dalam pariwisata sering disebut dengan sine-qua-non/necessary condition yaitu atraksi, aksesibilitas, akomodasi, amenitas dan kepedulian atau kesadaran pariwisata atau disebut *awareness*.

Analisis AHP

Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan untuk menentukan prioritas kebijakan pariwisata di Labuhan Bajo, terdiri dari 5 (lima) bagian yaitu kriteria Atraksi; kriteria Aksesibilitas; kriteria Amenitas, kriteria Awareness dan kriteria Akomodasi. Alasan pemilihan kriteria telah dibahas pada bab sebelumnya. Kriteria Atraksi telah menjadi representasi beragam daya tarik obyek wisata atau aktifitas lainnya yang merupakan bagian utama dari sebuah destinasi wisata. Kriteria aksesibilitas telah menjadi representasi dari hubungan dengan objek wisata lainnya terkait jarak dan waktu tempuh, ketersediaan transportasi berdasarkan jenis dan harga penggunaan jasa transportasi. Kriteria amenitas telah menjadi representasi Infrastruktur penunjang pariwisata yang khusus diadakan karena mutlak dibutuhkan dalam industri pariwisata bank, money changer, atm, toilet, restoran jaringan komunikasi, dll. Kriteria awareness telah menjadi representasi kemampuan mengakui dan memahami pengaruh budaya terhadap nilai-nilai dan perilaku manusia dan kriteria akomodasi telah menjadi representasi dari ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata, pengelolaan dan pelayanan kepada pengunjung, pemasaran, dan pengaturan pengunjung. Adapun kriteria jumlah kunjungan wisatawan telah menjadi representasi kriteria daya tarik objek wisata, dan potensi pasar. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat digunakan 5 (lima) kriteria tersebut, yakni : Atraksi, Aksesibilitas, Awareness, Amenitas, dan Akomodasi, dalam menentukan prioritas kebijakan pengembangan pariwisata di Labuhan Bajo.

Proses awal AHP, masalah disusun dalam bentuk struktur hirarki yang didalamnya terdapat tujuan, kriteria, sub kriteria, dan alternatif. Gambar 4.1. merupakan struktur hirarki dalam menganalisis prioritas kebijakan pariwisata di Labuhan Bajo



Gambar 1 menunjukkan bahwa penentuan prioritas kebijakan pariwisata di Labuhan Bajo, dapat digunakan 5 (lima) kriteria, yakni kriteria atraksi; kriteria aksesibilitas; kriteria amenitas, kriteria awareness dan kriteria akomodasi. Adapun alternatif dalam proses analisa ini adalah pariwisata di Labuhan Bajo.

1. Matriks Perbandingan Berpasangan

Berdasarkan struktur hirarki pada (Gambar 4.1) dapat dilanjutkan ke tahap pemberian bobot sesuai derajat kepentingan (*Comparative Judgment*) pada matriks perbandingan berpasangan (*Pairwise Comparison*). Tahap ini merupakan tahap pemberian bobot derajat kepentingan yang secara khusus ditentukan oleh pengambil keputusan yaitu Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 5
Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Utama

	Atraksi	Aksesibilitas	Amenitas	Awariness	Akomodasi
Atraksi	1	3	3	5	1
Aksesibilitas	1/3	1	3	3	1/5
Amenitas	1/5	1/3	1	3	1/5
Awariness	1/5	1/3	1/3	1	1/7
Akomodasi	1/5	5	5	7	1
Jumlah	1.93	9.67	12.33	19.00	2.54

Sumber : hasil olahan data (2023)

Hasil tabel 5 menunjukkan bahwa kriteria atraksi (baris) jika dibandingkan dengan kriteria atraksi (kolom) bernilai 1/1 yang berarti sama penting, sedangkan kriteria atraksi (baris) jika dibandingkan dengan kriteria aksesibilitas (kolom) bernilai 3/1 yang berarti kriteria atraksi sedikit lebih penting jika dibandingkan dengan kriteria aksesibilitas, Kriteria atraksi (baris) jika dibandingkan dengan kriteria amenitas (kolom) bernilai 3/1 yang berarti kriteria atraksi sedikit lebih penting jika dibandingkan dengan kriteria amenitas, kriteria atraksi (baris) jika dibandingkan dengan awareness (kolom) bernilai 5/1 yang berarti kriteria atraksi lebih penting jika dibandingkan dengan kriteria awareness dan kriteria atraksi (baris) jika dibandingkan dengan akomodasi (kolom) bernilai 1/1 yang berarti berarti sama penting dibandingkan dengan kriteria akomodasi. Adapun untuk kriteria yang lainnya sama dengan cara mengikuti tabel 3.2 tentang skala perbandingan berpasangan.

Nilai bobot derajat kepentingan kemudian di normalisasi dan dilanjutkan dengan perhitungan nilai prioritas vektor setiap kriteria. Tabel 4.5 menampilkan matriks bobot kriteria.

Tabel 6
Matriks Bobot untuk Kriteria Utama

	Atraksi	Aksesibilitas	Amenitas	Awariness	Akomodasi	Jumlah	Rata – rata Vektor Prioritas
Atraksi	0.5172	0.3103	0.2432	0.2632	0.3933	1.7272	0.3454
Aksesibilitas	0.1724	0.1034	0.2432	0.1579	0.0787	0.7557	0.1511
Amenitas	0.1034	0.0345	0.0811	0.1579	0.0787	0.4556	0.0911
Awariness	0.1034	0.0345	0.0270	0.0526	0.0562	0.2738	0.0548
Akomodasi	0.1034	0.5172	0.4054	0.3684	0.3933	1.7878	0.3576
Jumlah							1

Sumber : hasil olahan data (2023)

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai prioritas vektor untuk kriteria atraksi bernilai 0,3454; nilai prioritas untuk kriteria aksesibilitas bernilai 0,1511; nilai prioritas vektor untuk kriteria amenitas bernilai 0,0911; nilai prioritas vektor untuk kriteria awariness bernilai 0,0548 dan nilai prioritas vektor untuk kriteria akomodasi bernilai 0,3576. Nilai prioritas vektor merupakan nilai-nilai yang menampilkan tingkat prioritas dari semua kriteria, semakin besar nilai prioritas vektor berarti semakin penting kriteria tersebut.

Nilai prioritas vektor selanjutnya dijumlahkan untuk memperoleh nilai konsistensi indeks dan nilai konsistensi rasio. Untuk mendapatkan nilai konsistensi rasio, dibutuhkan nilai konsistensi indeks (Consistency Index/CI) yaitu nilai yang menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh tidak berubah-ubah sehingga menjamin hasil akhir yang signifikan dan dapat dipercaya. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka nilai konsistensi indeks diperoleh dari nilai eigen (lambda max) dikurangi dengan jumlah kriteria (n) dan dibagi dengan jumlah kriteria dikurangi 1. Adapun proses mendapatkan nilai lambda max adalah sebagai berikut :

$$\chi_{max} = (0,3454 \times 1,93) + (0,1511 \times 9,67) + (0,0911 \times 12,33) + (0,0548 \times 19) + (0,3576 \times 2,54) \\ = 5,2020$$

$$CI = \frac{\chi_{max} - 1}{n - 1} = \frac{5,2020 - 5}{5 - 1} = 0,05$$

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,05}{1,12} = 0,044$$

Dimana nilai Random Index (RI) berdasarkan perhitungan Saaty, dapat dilihat dari tabel 7

Tabel 7
Tabel Nilai Pembangkit Random (RI)

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0,00	0,00	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49

Nilai konsistensi indeks yang diperoleh ialah 0,05 dan nilai konsistensi rasio yang diperoleh ialah 0,044, nilai konsistensi rasio dari perhitungan diatas kurang dari 10%, dengan demikian nilai bobot derajat kepentingan matriks perbandingan berpasangan pada kriteria serta alternatif yang diberikan konsisten dan tidak perlu diulang kembali, apabila nilai konsistensi rasio lebih dari 10% maka pemberian bobot derajat kepentingan pada matriks perbandingan berpasangan harus diulang kembali. Setelah diperoleh nilai evaluasi konsistensi indeks dan konsistensi rasio dari matriks perbandingan berpasangan kriteria utama, selanjutnya dapat dilanjutkan komputasi AHP pada setiap sub kriteria dari masing – masing kriteria.

2. Sub kriteria Atraksi

Penilaian terkait sub kriteria atraksi dalam menentukan prioritas kebijakan pariwisata disesuaikan dengan beragam daya tarik obyek wisata atau aktifitas lainnya yang merupakan bagian utama dari sebuah destinasi wisata. Peneliti ingin melihat pengembangan health tourism, yatch tourism, dan adventure tourism yang sudah ditetapkan sebagai salah satu kebijakan Pariwisata di Labuhan Bajo. Sebagai objek pengamatan, atraksi di bagi menjadi 3 bagian yaitu 1. Atraksi Alam,

2. Atraksi Budaya dan 3. Atraksi Buatan Manusia. Kemudian dapat dilanjutkan ke tahap Pemberian bobot sesuai derajat kepentingan (*Comparative Judgment*) pada matriks perbandingan berpasangan (*Pairwise Comparison*).

Tabel 8
Matriks Perbandingan Berpasangan Sub Kriteria Atraksi

	Alam	Budaya	Buatan manusia
Alam	1	3/1	7/1
Budaya	1/3	1	5/1
Buatan manusia	1/7	1/5	1
Jumlah	1.48	4.20	13.00

Sumber : hasil olahan data (2023)

Dari Tabel 8 menunjukkan bahwa pada Kriteria Atraksi, atraksi alam jika dibandingkan dengan atraksi alam bernilai 1/1 yang berarti sama penting, atraksi alam jika dibandingkan dengan atraksi budaya bernilai 3/1 yang berarti kriteria alam sedikit lebih penting dibandingkan dengan kriteria budaya; atraksi alam jika dibandingkan dengan atraksi buatan manusia bernilai 7/1 yang berarti kriteria alam sangat lebih penting dibandingkan dengan kriteria buatan manusia, demikian seterusnya hingga pada kriteria terakhir. Nilai bobot derajat kepentingan kemudian di normalisasi dan dilanjutkan dengan perhitungan nilai prioritas vektor setiap kriteria. Tabel 4.8 menampilkan matriks bobot kriteria.

Tabel 9
Matriks Bobot untuk Sub kriteria Atraksi

	Alam	Budaya	Buatan manusia	Jumlah	Rata - Rata Vektor Prioritas
Alam	0.6774	0.7143	0.5385	1.9302	0.6434
Budaya	0.2258	0.2381	0.3846	0.8485	0.2828
Buatan manusia	0.0968	0.0476	0.0769	0.2213	0.0738
Jumlah					1.0000

Sumber : hasil olahan data (2023)

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai prioritas vektor untuk sub kriteria, atraksi alam 0,6434; nilai prioritas vektor untuk sub kriteria, atraksi budaya bernilai 0,2828; dan nilai prioritas vektor sub kriteria, atraksi buatan alam bernilai 0,0738; Berdasarkan perhitungan tersebut, Atraksi alam memiliki nilai prioritas tertinggi yaitu 0,6434 dibandingkan dengan alternatif lainnya, serta memiliki pertimbangan yang kuat dalam menentukan prioritas kebijakan pariwisata.

Nilai prioritas vektor selanjutnya dijumlahkan untuk memperoleh nilai konsistensi indeks dan nilai konsistensi rasio. Untuk mendapatkan nilai konsistensi rasio, dibutuhkan nilai konsistensi indeks (*Consistency Index/CI*) yaitu nilai yang menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh tidak berubah-ubah sehingga menjamin hasil akhir yang signifikan dan dapat dipercaya. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka nilai konsistensi indeks diperoleh dari nilai eigen (*lambda max*) dikurangi dengan jumlah kriteria (*n*) dan dibagi dengan jumlah kriteria dikurangi 1. Adapun proses mendapatkan nilai *lambda max* adalah sebagai berikut :

$$\chi_{max} = (0,6434 \times 1,48) + (0,2828 \times 4,20) + (0,0738 \times 13) = 3,0967$$

$$CI = \frac{\chi_{max} - 1}{n - 1} = \frac{3,0967 - 3}{3 - 1} = 0,05$$

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,05}{0,58} = 0,086$$

Nilai konsistensi indeks sub kriteria atraksi yang diperoleh ialah 0,05 dan nilai konsistensi rasio yang diperoleh ialah 0,086, nilai konsistensi rasio dari perhitungan diatas kurang dari 10%, dengan demikian nilai bobot derajat kepentingan matriks perbandingan berpasangan pada kriteria serta alternatif yang diberikan konsisten dan tidak perlu diulang kembali.

3. Sub Kriteria Aksesibilitas

Penilaian terkait sub kriteria aksesibilitas dalam menentukan prioritas kebijakan pariwisata disesuaikan faktor yang mendukung kemudahan wisatawan untuk mencapai lokasi wisata, seperti tersedianya moda transportasi dan kemudahan akses menuju lokasi wisata. Ada dua alternatif yang akan diuji yaitu tersedianya Infrastruktur (kondisi/ akses jalan yang baik) dan tersedianya transportasi sebagai akses (laut, udara dan darat). Kemudian dapat dilanjutkan ke tahap pemberian bobot sesuai derajat kepentingan (Comparative Judgment) pada matriks perbandingan berpasangan (Pairwise Comparison).

Tabel 10
Matriks Perbandingan Berpasangan Sub Kriteria Aksesibilitas

	Tersedianya Infrastruktur (kondisi/ akses jalan yang baik)	Tersedianya Transportasi sebagai akses (laut, udara dan darat)
Tersedianya Infrastruktur (kondisi/ akses jalan yang baik)	1/1	1/7
Tersedianya Transportasi sebagai akses (laut, udara dan darat)	7/1	1/1
Jumlah	8.00	1.14

Sumber : hasil olahan data (2023)

Dari tabel 10 menunjukkan bahwa pada Sub kriteria Aksesibilitas, tersedianya Infrastruktur (kondisi/ akses jalan yang baik) jika dibandingkan dengan tersedianya Infrastruktur (kondisi/ akses jalan yang baik) bernilai 1/1 yang berarti sama penting, tersedianya Infrastruktur (kondisi/ akses jalan yang baik) jika dibandingkan dengan tersedianya transportasi sebagai akses (laut, udara dan darat) bernilai 1/7 yang berarti tersedianya transportasi sebagai akses (laut, udara dan darat) sangat lebih penting dibandingkan dengan tersedianya Infrastruktur (kondisi/ akses jalan yang baik); begitu pula sebaliknya. Nilai bobot derajat kepentingan kemudian di normalisasi dan dilanjutkan dengan perhitungan nilai prioritas vektor setiap kriteria. Tabel 4.10 menampilkan matriks bobot kriteria.

Tabel 11
Matriks Bobot untuk Sub kriteria Aksesibilitas

	Tersedianya Infrastruktur (kondisi/ akses jalan yang baik)	Tersedianya Transportasi sebagai akses (laut, udara dan darat)	Jumlah	Rata - Rata Vektor Prioritas
Tersedianya Infrastruktur (kondisi/ akses jalan yang baik)	0.1250	0.1250	0.2500	0.1250
Tersedianya Transportasi sebagai akses (laut, udara dan darat)	0.8750	0.8750	1.7500	0.8750
Jumlah				1.0000

Sumber : hasil olahan data (2023)

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai prioritas vektor untuk sub kriteria, tersedianya Infrastruktur (kondisi/ akses jalan yang baik) 0,1250; nilai prioritas vektor untuk sub kriteria,

tersedianya transportasi sebagai akses (laut, udara dan darat) bernilai 0,8750; Berdasarkan perhitungan tersebut, tersedianya transportasi sebagai akses (laut, udara dan darat) memiliki nilai prioritas tertinggi yaitu 0,8750 dibandingkan dengan alternatif lainnya, serta memiliki pertimbangan yang kuat dalam menentukan prioritas kebijakan pariwisata.

Nilai prioritas vektor selanjutnya dijumlahkan untuk memperoleh nilai konsistensi indeks dan nilai konsistensi rasio. Untuk mendapatkan nilai konsistensi rasio, dibutuhkan nilai konsistensi indeks (Consistency Index/CI) yaitu nilai yang menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh tidak berubah-ubah sehingga menjamin hasil akhir yang signifikan dan dapat dipercaya. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka nilai konsistensi indeks diperoleh dari nilai eigen (lamba max) dikurangi dengan jumlah kriteria (n) dan dibagi dengan jumlah kriteria dikurangi 1. Adapun proses mendapatkan nilai lambda max adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\chi_{max} &= (0,1250 \times 8) + (0,8750 \times 1,14) = 2 \\ CI &= \frac{\chi_{max} - (n - 1)}{n - 1} = \frac{2 - 2}{2 - 1} = 0,00 \\ CR &= \frac{CI}{RI} = \frac{0,00}{0,00} = 0,00\end{aligned}$$

Nilai konsistensi indeks sub kriteria atraksi yang diperoleh ialah 0,00 dan nilai konsistensi rasio yang diperoleh ialah 0,00, nilai konsistensi rasio dari perhitungan diatas kurang dari 10%, dan jika nilai CI sama dengan nol, maka matriks pairwise comparison tersebut konsisten. dengan demikian nilai bobot derajat kepentingan matriks perbandingan berpasangan pada kriteria serta alternatif yang diberikan konsisten dan tidak perlu diulang kembali.

4. Sub Kriteria Amenitas

Penilaian terkait sub kriteria amenitas dalam menentukan prioritas kebijakan pariwisata menggunakan infrastruktur penunjang pariwisata yang khusus diadakan karena mutlak dibutuhkan dalam industri pariwisata bank, money changer, atm, toilet, restoran jaringan komunikasi, dll. Fasilitas ini dapat memanfaatkan sumber daya yang telah ada maupun menciptakan fasilitas baru dengan tidak meninggalkan karakteristik atau keunikan wilayah/obyek wisata tertentu. Yang akan menjadi alternatif kriteria adalah Fasilitas Perbankan, Bank, Money Chancer, ATM; Jaringan Komunikasi 4G/5G; Fasilitas Publik penunjang, Restoran, Toilet, dll. Kemudian dapat dilanjutkan ke tahap Pemberian bobot sesuai derajat kepentingan (Comparative Judgment) pada matriks perbandingan berpasangan (Pairwise Comparison).

Tabel 12

Matriks Perbandingan Berpasangan Sub Kriteria Amenitas

	Fasilitas Perbankan, Bank, Money Chancer, ATM	Jaringan Komunikasi 4G/5G	Fasilitas Publik penunjang, Restoran, Toilet, dll
Fasilitas Perbankan, Bank, Money Chancer, ATM	1/1	2/1	5/1
Jaringan Komunikasi 4G/5G	½	1/1	5/1
Fasilitas Publik penunjang, Restoran, Toilet, dll	1/5	1/5	1
Jumlah	1.70	3.20	11.00

Sumber : hasil olahan data (2023)

Dari tabel 12 menunjukkan bahwa pada Sub Kriteria Amenitas, fasilitas perbankan, Bank, Money Chancer, ATM jika dibandingkan dengan fasilitas perbankan, Bank, Money Chancer, ATM bernilai 1/1 yang berarti sama penting, fasilitas perbankan, Bank, Money Chancer, ATM jika dibandingkan dengan jaringan Komunikasi 4G/5G bernilai 2/1 yang berarti antara kriteria alternatif kriteria fasilitas perbankan, Bank, Money Chancer, ATM dan jaringan Komunikasi 4G/5G mempunyai prioritas antara sama dan sedikit lebih penting; fasilitas perbankan, Bank, Money Chancer, ATM jika dibandingkan dengan Fasilitas Publik penunjang, Restoran, Toilet, dll bernilai

5/1 yang berarti kriteria alternatif fasilitas perbankan, Bank, Money Chancer, ATM lebih penting dibandingkan dengan kriteria Fasilitas Publik penunjang, Restoran, Toilet, dll, demikian seterusnya hingga pada kriteria terakhir. Nilai bobot derajat kepentingan kemudian dinormalisasi dan dilanjutkan dengan perhitungan nilai prioritas vektor setiap kriteria. Tabel 4.12 menampilkan matriks bobot kriteria.

Tabel 13
Matriks Bobot untuk Sub kriteria Amenitas

	Fasilitas Perbankan, Bank, Money Chancer, ATM	Jaringan Komunikasi 4G/5G	Fasilitas Publik penunjang, Restoran, Toilet, dll	Jumlah	Rata - Rata Vektor Prioritas
Fasilitas Perbankan, Bank, Money Chancer, ATM	0.5882	0.6250	0.4545	1.6678	0.5559
Jaringan Komunikasi 4G/5G	0.2941	0.3125	0.4545	1.0612	0.3537
Fasilitas Publik penunjang, Restoran, Toilet, dll	0.1176	0.0625	0.0909	0.2711	0.0904
Jumlah					1.0000

Sumber : hasil olahan data (2023)

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai prioritas vektor untuk sub kriteria, Fasilitas Perbankan, Bank, Money Chancer, ATM 0,5559; nilai prioritas vektor untuk sub kriteria, Jaringan Komunikasi 4G/5G bernilai 0,3537; dan nilai prioritas vektor untuk sub kriteria, Fasilitas Publik penunjang, Restoran, Toilet, dll bernilai 0,0904. Berdasarkan perhitungan tersebut, Fasilitas Perbankan, Bank, Money Chancer, ATM memiliki nilai prioritas tertinggi yaitu 0.5559 dibandingkan dengan alternatif lainnya, serta memiliki pertimbangan yang kuat dalam menentukan prioritas kebijakan pariwisata.

Nilai prioritas vektor selanjutnya dijumlahkan untuk memperoleh nilai konsistensi indeks dan nilai konsistensi rasio. Untuk mendapatkan nilai konsistensi rasio, dibutuhkan nilai konsistensi indeks (Consistency Index/CI) yaitu nilai yang menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh tidak berubah-ubah sehingga menjamin hasil akhir yang signifikan dan dapat dipercaya. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka nilai konsistensi indeks diperoleh dari nilai eigen (λ_{max}) dikurangi dengan jumlah kriteria (n) dan dibagi dengan jumlah kriteria dikurangi 1. Adapun proses mendapatkan nilai λ_{max} adalah sebagai berikut :

$$\lambda_{max} = (0,5559 \times 1,70) + (0,3537 \times 3,20) + (0,0904 \times 11) = 3,0709$$

$$CI = \frac{\lambda_{max} - (n - 1)}{n - 1} = \frac{3,0709 - 3}{3 - 1} = 0,04$$

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,04}{0,58} = 0,0611$$

Nilai konsistensi indeks sub kriteria amenitas yang diperoleh ialah 0,04 dan nilai konsistensi rasio yang diperoleh ialah 0,0611, nilai konsistensi rasio dari perhitungan di atas kurang dari 10%, dengan demikian nilai bobot derajat kepentingan matriks perbandingan berpasangan pada kriteria serta alternatif yang diberikan konsisten dan tidak perlu diulang kembali.

5. Sub Kriteria Awareness

Penilaian terkait sub kriteria awareness dalam menentukan prioritas kebijakan pariwisata dengan memiliki makna tentang kemampuan mengakui dan memahami pengaruh budaya terhadap nilai-nilai dan perilaku manusia. Dan bagaimana semua pemangku kepentingan terkait sektor pariwisata memiliki sikap yang positif atas aktifitas pariwisata. Dalam hal ini partisipasi dari penduduk lokal, dan bagaimana masyarakat lokal sadar pariwisata. Ada tiga point yang menjadi alternatif berkaitan dengan awareness, yaitu : Pemberdayaan UMKM, Kesadaran pariwisata oleh masyarakat, Pemda, seluruh pelaku pariwisata dan Pariwisata berbasis masyarakat. CBT adalah

pariwisata yang menitikberatkan pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya ke dalam satu kemasan. Kemudian dapat dilanjutkan ke tahap Pemberian bobot sesuai derajat kepentingan (Comparative Judgment) pada matriks perbandingan berpasangan (Pairwise Comparison).

Tabel 14
Matriks Perbandingan Berpasangan Sub Kriteria Awarness

	Pemberdayaan UMKM	Kesadaran pariwisata oleh masyarakat, pemda dan seluruh pelaku pariwisata	Pariwisata berbasis masyarakat. CBT adalah pariwisata yang menitikberatkan pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya ke dalam satu kemasan
Pemberdayaan UMKM	1/1	5/1	1/1
Kesadaran pariwisata oleh masyarakat, pemda dan seluruh pelaku pariwisata	1/5	1/1	1/3
Pariwisata berbasis masyarakat. CBT adalah pariwisata yang menitikberatkan pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya ke dalam satu kemasan	1/1	3/1	1/1
Jumlah	2.20	9.00	2.33

Sumber : hasil olahan data (2023)

Dari tabel 14 menunjukkan bahwa pada Sub Kriteria Amenitas, Pemberdayaan UMKM jika dibandingkan dengan Pemberdayaan UMKM bernilai 1/1 yang berarti sama penting, Pemberdayaan UMKM jika dibandingkan dengan Kesadaran pariwisata oleh masyarakat, pemda dan seluruh pelaku pariwisata bernilai 5/1 yang berarti antara kriteria Pemberdayaan UMKM; lebih penting dibandingkan dengan kriteria Kesadaran pariwisata oleh masyarakat, pemda dan seluruh pelaku pariwisata; dan Pemberdayaan UMKM jika dibandingkan dengan Pariwisata berbasis masyarakat. CBT adalah pariwisata yang menitikberatkan pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya ke dalam satu kemasan bernilai 1/1 yang berarti yang berarti sama penting, demikian seterusnya hingga pada kriteria terakhir. Nilai bobot derajat kepentingan kemudian di normalisasi dan dilanjutkan dengan perhitungan nilai prioritas vektor setiap kriteria. Tabel 4.14 menampilkan matriks bobot kriteria.

Tabel 15
Matriks Bobot untuk Sub Kriteria Awarness

Pemberdayaan UMKM	Kesadaran pariwisata oleh masyarakat, pemda dan seluruh pelaku	Pariwisata berbasis masyarakat. CBT adalah pariwisata yang menitikberatkan pada	Jumlah	Rata - Rata Vektor Prioritas
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------------------------------

		pariwisata	keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya ke dalam satu kemasan		
Pemberdayaan UMKM	0.4545	0.5556	0.4286	1.4387	0.4796
Kesadaran pariwisata oleh masyarakat, pmda dan seluruh pelaku pariwisata	0.0909	0.1111	0.1429	0.3449	0.1150
Pariwisata berbasis masyarakat. CBT adalah pariwisata yang menitikberatkan pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya ke dalam satu kemasan	0.4545	0.3333	0.4286	1.2165	0.4055
Jumlah					1.0000

Sumber : hasil olahan data (2023)

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai prioritas vektor untuk sub kriteria, Pemberdayaan UMKM bernilai 0,4796; nilai prioritas vektor untuk sub kriteria, Kesadaran pariwisata oleh masyarakat, pmda dan seluruh pelaku pariwisata bernilai 0,1150; dan nilai prioritas vektor untuk sub kriteria, Pariwisata berbasis masyarakat. CBT adalah pariwisata yang menitikberatkan pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya ke dalam satu kemasan bernilai 0,4055. Berdasarkan perhitungan tersebut, pemberdayaan UMKM memiliki nilai prioritas tertinggi yaitu 0.4796 dibandingkan dengan alternatif lainnya, serta memiliki pertimbangan yang kuat dalam menentukan prioritas kebijakan pariwisata.

Nilai prioritas vektor selanjutnya dijumlahkan untuk memperoleh nilai konsistensi indeks dan nilai konsistensi rasio. Untuk mendapatkan nilai konsistensi rasio, dibutuhkan nilai konsistensi indeks (Consistency Index/CI) yaitu nilai yang menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh tidak berubah-ubah sehingga menjamin hasil akhir yang signifikan dan dapat dipercaya. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka nilai konsistensi indeks diperoleh dari nilai eigen (lambda max) dikurangi dengan jumlah kriteria (n) dan dibagi dengan jumlah kriteria dikurangi 1. Adapun proses mendapatkan nilai lambda max adalah sebagai berikut :

$$\chi_{max} = (0,4796 \times 2,20) + (0,1150 \times 9) + (0,4055 \times 2,33) = 3,0358$$

$$CI = \frac{\chi_{max} - (n - 1)}{n - 1} = \frac{3,0358 - 3}{3 - 1} = 0,02$$

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,02}{0,58} = 0,0309$$

Nilai konsistensi indeks sub kriteria awarness yang diperoleh ialah 0,02 dan nilai konsistensi rasio yang diperoleh ialah 0,0309, nilai konsistensi rasio dari perhitungan diatas kurang

dari 10%, dengan demikian nilai bobot derajat kepentingan matriks perbandingan berpasangan pada kriteria serta alternatif yang diberikan konsisten dan tidak perlu diulang kembali.

6. Sub Kriteria Akomodasi

Penilaian terkait sub kriteria akomodasi dalam menentukan prioritas kebijakan pariwisata dengan memasukkan unsur kemudahan mendapatkan tempat menginap yang layak, aman, nyaman dan bersih/telah memenuhi persyaratan sanitasi, seperti: hotel, losmen, guest house, home stay dll. Tabel 4.15 akan menjelaskan tentang matriks berpasangan untuk kriteria akomodasi.

Tabel 15
Matriks Perbandingan Berpasangan Sub Kriteria Akomodasi

	Tersedianya tempat menginap yang layak, aman, nyaman dan bersih/telah memenuhi persyaratan sanitasi	Penerapan Hospitality	Konsep penginapan rakyat, seperti guest house, losmen, homestay	Konsep penginapan Luxury, seperti hotel bintang 5
Tersedianya tempat menginap yang layak, aman, nyaman dan bersih/telah memenuhi persyaratan sanitasi	1.00	2.00	3.00	3.00
Penerapan Hospitality	0.50	1.00	2.00	2.00
Konsep penginapan rakyat, seperti guest house, losmen, homestay	0.33	0.50	1.00	1.00
Konsep penginapan Luxury, seperti hotel bintang 5	0.33	0.50	1.00	1.00
Jumlah	2.17	4.00	7.00	7.00

Sumber : hasil olahan data (2023)

Hasil tabel 16 menunjukkan bahwa kriteria tersedianya tempat menginap yang layak, aman, nyaman dan bersih/telah memenuhi persyaratan sanitasi (baris) jika dibandingkan dengan kriteria Tersedianya tempat menginap yang layak, aman, nyaman dan bersih/telah memenuhi persyaratan sanitasi (kolom) bernilai 1/1 yang berarti sama penting, sedangkan kriteria tersedianya tempat menginap yang layak, aman, nyaman dan bersih/telah memenuhi persyaratan sanitasi (baris) jika dibandingkan dengan kriteria penerapan Hospitality (kolom) bernilai 2/1 yang berarti mempunyai prioritas antara sama dan sedikit lebih penting, Kriteria Tersedianya tempat menginap yang layak, aman, nyaman dan bersih/telah memenuhi persyaratan sanitasi (baris) jika dibandingkan dengan kriteria konsep penginapan rakyat, seperti guest house, losmen, homestay (kolom) bernilai 3/1 yang berarti kriteria tersedianya tempat menginap yang layak, aman, nyaman dan bersih/telah memenuhi persyaratan sanitasi sedikit lebih penting jika dibandingkan dengan kriteria konsep penginapan rakyat, seperti guest house, losmen, homestay, kriteria tersedianya tempat menginap yang layak, aman, nyaman dan bersih/telah memenuhi persyaratan sanitasi (baris) jika dibandingkan dengan konsep penginapan Luxury, seperti hotel bintang 5 (kolom) bernilai 3/1 yang berarti kriteria tersedianya tempat menginap yang layak, aman, nyaman dan bersih/telah memenuhi persyaratan sanitasi sedikit lebih penting jika dibandingkan dengan kriteria konsep penginapan Luxury, seperti hotel bintang 5. Adapun untuk kriteria yang lainnya sama dengan cara mengikuti tabel 3.1 tentang

skala perbandingan berpasangan. Nilai bobot derajat kepentingan kemudian di normalisasi dan dilanjutkan dengan perhitungan nilai prioritas vektor setiap kriteria. Tabel 4.16 menampilkan matriks bobot kriteria.

Tabel 17
Matriks Bobot untuk Kriteria Akomodasi

	Tersedianya tempat menginap yang layak, aman, nyaman dan bersih/telah memenuhi persyaratan sanitasi	Penerapan Hospitality	Konsep penginapan rakyat, seperti guest house, losmen, homestay	Konsep penginapan Luxury, seperti hotel bintang 5	Jumlah	Rata - rata Vektor Prioritas
Tersedianya tempat menginap yang layak, aman, nyaman dan bersih/telah memenuhi persyaratan sanitasi	0.4615	0.5000	0.4286	0.4286	1.8187	0.4547
Penerapan Hospitality	0.2308	0.2500	0.2857	0.2857	1.0522	0.2630
Konsep penginapan rakyat, seperti guest house, losmen, homestay	0.1538	0.1250	0.1429	0.1429	0.5646	0.1411
Konsep penginapan Luxury, seperti hotel bintang 5	0.1538	0.1250	0.1429	0.1429	0.5646	0.1411
Jumlah						1

Sumber : hasil olahan data (2023)

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai prioritas vektor untuk kriteria tersedianya tempat menginap yang layak, aman, nyaman dan bersih/telah memenuhi persyaratan sanitasi bernilai 0,4547; nilai prioritas untuk kriteria penerapan hospitality bernilai 0,2630; nilai prioritas vektor untuk kriteria konsep penginapan rakyat, seperti guest house, losmen, homestay bernilai 0,1411; dan nilai prioritas vektor untuk kriteria konsep penginapan Luxury, seperti hotel bintang 5 bernilai 0,1411.

Nilai prioritas vektor merupakan nilai-nilai yang menampilkan tingkat prioritas dari semua kriteria, semakin besar nilai prioritas vektor berarti semakin penting kriteria tersebut. Berdasarkan perhitungan tersebut, tersedianya tempat menginap yang layak, aman, nyaman dan bersih/telah memenuhi persyaratan sanitasi bernilai 0,4547 dibandingkan dengan alternatif lainnya, serta memiliki pertimbangan yang kuat dalam menentukan prioritas kebijakan pariwisata.

Nilai prioritas vektor selanjutnya dijumlahkan untuk memperoleh nilai konsistensi indeks dan nilai konsistensi rasio. Untuk mendapatkan nilai konsistensi rasio, dibutuhkan nilai konsistensi indeks (Consistency Index/CI) yaitu nilai yang menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh tidak berubah-ubah sehingga menjamin hasil akhir yang signifikan dan dapat dipercaya. Berdasarkan

pemahaman tersebut, maka nilai konsistensi indeks diperoleh dari nilai eigen (lambda max) dikurangi dengan jumlah kriteria (n) dan dibagi dengan jumlah kriteria dikurangi 1. Adapun proses mendapatkan nilai lambda max adalah sebagai berikut :

$$\chi_{max} = (0,4547 \times 2,17) + (0,2630 \times 4) + (0,1411 \times 7) + (0,1411 \times 7) = 4,0133$$

$$CI = \frac{\chi_{max} - 1}{n - 1} = \frac{4,0133 - 4}{4 - 1} = 0,004$$

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,004}{0,90} = 0,0049$$

Nilai konsistensi indeks sub kriteria akomodasi yang diperoleh ialah 0,004 dan nilai konsistensi rasio yang diperoleh ialah 0,0049, nilai konsistensi rasio dari perhitungan diatas kurang dari 10%, dengan demikian nilai bobot derajat kepentingan matriks perbandingan berpasangan pada kriteria serta alternatif yang diberikan konsisten dan tidak perlu diulang kembali.

Berdasarkan pembahasan dan analisis dapat diambil beberapa hasil bahwa : Pertama, untuk mengembangkan pariwisata di Labuhan Bajo, Pemerintah Daerah membutuhkan prioritas kebijakan pengembangan untuk mengoptimalkan pengelolaan pariwisata sehingga memiliki pertumbuhan yang signifikan. Kedua, metode Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan metode yang paling tepat untuk digunakan dalam menentukan prioritas kebijakan pengembangan pariwisata. Seperti halnya dalam penelitian ini, untuk menentukan prioritas diperlukan beberapa kriteria sebagai pertimbangan yakni; kriteria atraksi, kriteria aksesibilitas, kriteria amenitas, kriteria awareness dan kriteria akomodasi. Hasil perhitungan AHP, menunjukkan bahwa prioritas kebijakan pengembangan pariwisata di Labuhan Bajo ialah atraksi alam dengan nilai derajat kepentingan secara keseluruhan bernilai 0,6434, aksesibilitas tersedianya transportasi sebagai akses (laut, udara dan darat) dengan nilai derajat kepentingan secara keseluruhan bernilai 0,8750, amenitas tersedianya fasilitas perbankan, BANK, Money Chancer, ATM dengan nilai derajat kepentingan secara keseluruhan bernilai 0,5559, awareness terciptanya pemberdayaan UMKM dengan nilai derajat kepentingan secara keseluruhan bernilai 0,4796 dan untuk akomodasi tersedianya tempat menginap yang layak, aman, nyaman dan bersih/telah memenuhi persyaratan sanitasinilai derajat kepentingan secara keseluruhan bernilai 0,4547. Kelima hal inilah yang menjadi prioritas utama dalam pembentukan kebijakan pariwisata di Labuhan Bajo.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) maka dapat disimpulkan beberapa hal yakni dalam melakukan pengembangan pariwisata super prioritas Labuan Bajo berdasarkan CBT yang berkelanjutan pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu membuat prioritas kebijakan pengembangan untuk mengoptimalkan pengelolaan pariwisata sehingga memiliki pertumbuhan yang signifikan dan berkelanjutan. Berikut tingkatan prioritas kebijakan pariwisata yang perlu dilakukan oleh pemerintah berdasarkan pada 5A.

1. Aksesibilitas tersedianya transportasi sebagai akses (laut, udara dan darat) dengan nilai derajat kepentingan secara keseluruhan bernilai 0,8750.
 2. Atraksi alam dengan nilai derajat kepentingan secara keseluruhan bernilai 0,6434.
 3. Amenitas tersedianya fasilitas perbankan, Bank, Money Chancer, ATM dengan nilai derajat kepentingan secara keseluruhan bernilai 0,5559.
 4. Awareness terciptanya pemberdayaan UMKM dengan nilai derajat kepentingan secara keseluruhan bernilai 0,4796.
 5. Akomodasi tersedianya tempat menginap yang layak, aman, nyaman dan bersih atau telah memenuhi persyaratan sanitasinilai derajat kepentingan secara keseluruhan bernilai 0,4547.
- Kelima hal inilah yang menjadi prioritas utama dalam pembentukan kebijakan pariwisata Super Prioritas Labuhan Bajo.

Referensi

- Abd Djalil, S., Takumansang, E. D., & Supardjo, S. (2019). Perencanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata Hijau Di Pulau Sulabesi, Kabupaten Kepulauan Sula. *Spasial*, 6(3), 736-745.
- Adnyana, I. M. (2020). Dampak Green Tourism Bagi Pariwisata Berkelanjutan Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(3), 1582-1592.

- Adiati dan Basalamah. 2014. Kondisi Pariwisata berkelanjutan di bidang sosial budaya berdasar pengalaman dan harapan pengunjung di Pantai Tanjung Papuma, Jember. *Binus Business Review*. Vol 5.No. 1. Mei 2014. Hal. 80-90
- Ahmad Rijali. (2018). Analisis data kualitatif. UIN Antasari Banjarmasin.
- Bhushan, N., & Rai, K. (2004). *Strategic Decision Making: plying the Analytic Hierarchy Process*. London: Springer.
- Brodjonegoro, B. P. (1992). AHP. Jakarta: Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Indonesia.
- Cooper, Chris. Dkk. 1993. *Tourism Principles & Practice*. England: Longman Group
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Jawa Barat: CV Jejak (Jejak Publisher)
- Iswanto, A. I. (2022). Menilai Kesiapan Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung Pengembangan Dunia Industri Pariwisata Di Destinasi super prioritas Labuan Bajo
- Larasati, N., Indartuti, E., & Hartono, S. (2022). Administrasi Pembangunan Pariwisata super prioritas Taman Nasional Komodo. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 99-107.
- Laiskodat, Viktor. 2021. *Transformasi pariwisata Nusa Tenggara Timur*. Salatiga: Satya Wacana University Press
- Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Marry Ismowati dkk, Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Memaksimalkan Potensi ekonomi dan Pariwisata Kawasan Super Prioritas Nasional (KPSN) Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, Vol.9, No1, Maret 2022, pp 41-49
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (terjemahan). Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025
- Peraturan Daerah Provinsi NTT No. 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 -2023
- Saaty, T.L. (2008). Decision Making with Analytic Hierarchy Process. *International Journal Services Sciences*, 1, 83-98.
- Sin, H. L., & Minca, C. (2014). Touring responsibility: The trouble with 'going local' in community-based tourism in Thailand. *Geoforum*, 51, 96-106.
- Sirajuddin, Saleh (2017) *Analisis Data Kualitatif*. Pertama . Pustaka Ramadhan, Bandung, Bandung, Indonesia
- Suansri, P. (2003). *Community based tourism handbook* (pp. 11-14). Bangkok: Responsible Ecological Social Tour-REST.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tingginehe, A. M., Waani, J. O., & Wuisang, C. E. (2019). Perencanaan Pariwisata Hijau Di Distrik Roon Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. *Spasial*, 6(2), 511-520.
- Waloni, T. G. L., Kawatak, S. Y., & Ngenget, S. (2020). *Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Destinasi Super Prioritas Likupang* (Doctoral Dissertation, Universitas Katolik De La Salle)
- Wiwin, I. W. (2018). Community based tourism dalam pengembangan pariwisata Bali. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama dan Budaya*, 3(1), 69-75
- Wijaya, Tony. (2018), *Manajemen Kualitas Jasa*, Edisi Kedua, Jakarta: PT. Indeks